

Pascamarxisme dan Dekonstruksi: Sebuah Percobaan Awal untuk Membaca Kontur Pascamarxisme dari Lensa “Heideggerian-Kiri”

YULIUS TANDYANTO
Alumnus STF Driyarkara

Abstract: This article try to underscore a fertile possibility to relate the concept of “deconstruction” with postmarxism, insofar that the distinction between “the political” and “politics” could be traced to one of Heidegger’s key operative concepts, i.e. “*Destruktion*”. Within this optics I try to read Laclau-Mouffe’s criticism of historical materialism as a fruitful example of deconstruction that not only shows inadequacies of Marxian’s claims such as historical determinism, the priority of the proletariat, the dialectical teleology and the economic superiority, but also describes how both political theorists try to radicalize the concept of democracy. Therefore, the political could be understood as the contingent ground that deconstructs every rational order of politics.

Keywords: postmarxism, deconstruction, *Destruktion*, the political, politics, antagonism, radical democracy.

Pengantar

Apa kaitan inheren antara pascamarxisme dan dekonstruksi? Sebelum menjawab pertanyaan ini, perlulah kita sedikit berkenalan dengan kontur pemikiran pascamarxisme. Namun, penulis akan mencoba membaca gerak pascamarxisme dari lensa “Heideggerian-Kiri”. Dan sebagai percobaan awal, ditampilkannya kritik Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe terhadap materialisme historis.¹

Oleh karena itu penulis membagi tulisan ini dalam empat bagian utama, yaitu: (1) perihal konteks umum pascamarxisme, (2) landasan pascamarxisme, (3) kritik Laclau-Mouffe terhadap sejarah, dan (4) tawaran Mouffe tentang demokrasi radikal.

1. Apa itu Pascamarxisme?

Secara sederhana label pascamarxisme dapat dipahami sebagai suatu ambisi untuk meninggalkan Marx dan sekaligus juga mengakui peran strategis pemikirannya dalam membentuk suatu wacana yang radikal. Tentu saja ambisi tersebut berangkat dari berbagai pandangan yang mendiskreditkan bahwa Marxisme secara inheren bersifat otoriter dan totaliter, seperti tampak dalam praktik-praktik Leninisme.

Beberapa kritik pascamarxisme terhadap Marxisme, di antaranya: aspek totaliter dalam kinerja partai, ekonomi sebagai basis material untuk memahami kehidupan bersama, dan menomorduakan aspek individu dalam sistem komunisme. Sebaliknya, pascamarxisme justru menawarkan pluralisme, skeptisisme terhadap otoritas, kontingensi politik, dan gerakan-gerakan sosial yang baru.

¹ Penulis berhutang besar pada uraian Simon Tormey dan Jules Townshend dalam *Key Thinkers from Critical Theory to Postmarxism* (London: SAGE Publications, 2006) dan Stuart Sim dalam *Post-Marxism, An Intellectual History* (London and New York: Routledge, 2000) sebagai pijakan untuk membaca pemikiran Laclau-Mouffe dalam kerangka pascamarxisme.

Berdasarkan karakteristik itulah pascamarxisme berupaya menanggapi krisis pascakomunisme Soviet—sekaligus terhadap maraknya gerakan-gerakan kelompok radikal kanan (populisme). Dan entah disengaja ataupun tidak, pemikiran pascamarxisme pada umumnya “berjarak” dengan pergulatan-pergulatan aktual. Dengan kata lain, pascamarxisme adalah suatu “praksis” intelektual—dan bukan sebuah “ideologi”.²

Secara ringkas, pascamarxisme mempersoalkan sekurang-kurangnya tiga hal yang menjadi ciri khas Marxisme. *Pertama*, teori sejarah Marx. Para akademisi pascamarxisme mempersoalkan teori sejarah Marx dan memahaminya sebagai sebuah teleologi historis. Mereka mempersoalkan sejarah yang berpihak pada kelas proletar dengan memprediksikan keruntuhan kapitalisme dan munculnya komunisme. Selain itu, para pemikir pascamarxisme juga mempersoalkan penjelasan sejarah Marxisme yang didasarkan pada dialektika ekonomi—yang sekaligus juga digunakan untuk menerangkan situasi politik dan kebudayaan.

Kedua, perihal subyek revolusioner Marx. Sebagian besar pemikir pascamarxisme menganalisis bahwa determinisme sejarah tersebut berorientasi pada gerakan partai sebagai lokus untuk menandingi kapitalisme. Perhatian khusus Marx pada kelas proletariat dibandingkan kelas lainnya juga menegaskan bahwa hanya kelas tersebut yang memiliki kedudukan istimewa untuk mengemansipasi dirinya dan memulai suatu rezim yang baru. Dan emansipasi tersebut diejawantahkan hanya melalui partai—sehingga bersifat otoriter—dengan pendekatan-pendekatannya yang bersifat ilmiah dan positif.

Ketiga, persoalan demokrasi. Secara praktik, aspirasi demokrasi yang ditawarkan politisi Marxian hanya bersifat permukaan. Persoalannya, bagaimana teori emansipasi pada akhirnya bersifat demokratis dan dapat menampung berbagai perbedaan nilai ataupun identitas? Pada kenyataannya, praktik demokrasi yang diterapkan oleh partai-partai komunis bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Berdasarkan persoalan-persoalan itulah para pemikir pascamarxisme berupaya menawarkan varian-varian pandangannya. Berikut ini deskripsi singkat beberapa corak pascamarxisme:

- a) Pascamarxisme Castoriadis. Castoriadis sering diasosiasikan dengan kelompok yang mengembangkan analisis pasca-Trotsky perihal kapitalisme dan komunisme Soviet. Menurut Castoriadis, Marxisme bersifat kurang radikal sehingga terjebak pada otoritarianisme. Selain itu, Marxisme masih bersifat birokratis sehingga memadamkan energi-energi revolusioner yang bersifat lebih organis.
- b) Pascamarxisme Deleuze-Guattari. Fokus utama Deleuze-Guattari adalah memikirkan ulang konsep “materialisme” Marx. Mereka menggunakan teori-teori eksistensialisme, kaos, dan psikoanalisis untuk mengkritik kapitalisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Mereka juga mengelaborasi aspek imajinasi dan hasrat dalam politik emansipatoris.
- c) Pascamarxisme Lyotard. Gagasan kunci Lyotard terletak pada istilah “momen” yang menjadi salah satu unsur utama pemikiran pascamarxisme. Melalui istilah tersebut, Lyotard menganalisis Marxisme sebagai sebuah metanarasi atau gagasan yang mentotalisasi keseluruhan proses sejarah sehingga “menghilangkan” unsur kontingensi dan tanggung jawab manusia.
- d) Pascamarxisme Habermas. Habermas memang jarang disebut sebagai pemikir pascamarxisme. Namun, dalam konteks ini, istilah pascamarxisme sendiri perlu dipahami bukan sebagai sebuah ortodoksi atau mazhab baru. Pada praktiknya Habermas banyak menggunakan dan mengelaborasi karya-karya Marx. Bahkan, ia berupaya menawarkan materialisme historis dalam gayanya sendiri. Salah satu kontribusi penting Habermas adalah memikirkan kembali teori demokrasi yang diwariskan oleh Marx.
- e) Pascamarxisme Derrida. Sebagai penggagas teori dekonstruksi, Derrida menegaskan pentingnya Marx dan sekaligus mengadaptasi Marx sebagai sarana politik emansipatorisnya

² Tormey and Townshend, *Key Thinkers from Critical Theory to Postmarxism*, 3-4.

sendiri—sebagaimana dinyatakan dalam *Specters of Marx*. Kontribusi utama Derrida tidak hanya melanjutkan gagasan penting dan semangat Marx, tetapi juga memunculkan suatu gerakan antikapitalisme yang bercorak “pascamodern”.

2. Landasan Pascamarxisme: “yang-politis”

Salah satu cara untuk memahami pemikiran pascamarxisme adalah dengan menelusuri konteks pemikiran politik pascamodern. Pasalnya, pemikiran pascamarxisme berkembang dalam konteks zaman pascamodern yang membaca kembali gagasan-gagasan Marx. Dan salah satu kunci utama untuk memahaminya adalah pembedaan antara “politik” dan “yang-politis”—*die Politik* dan *das Politische* (Jerman); *la politique* dan *le politique* (Prancis); atau *politics* dan *the political* (Anglophone).

Akar pembedaan tersebut sesungguhnya dapat ditengarai sejauh para filsuf pascamarxisme mengelaborasi pemikiran Martin Heidegger—sebagai filsuf besar abad ke-20 yang mengkritik metafisika. Oliver Marchart menamakan golongan para pemikir tersebut sebagai “Heideggerian-Kiri”—bandingkan pula dengan “Heideggerian-Kanan” atau belokan teologis dalam fenomenologi sebagaimana dipaparkan oleh Dominique Janicaud.³

Secara prematur, inspirasi “pembedaan” yang dikembangkan oleh Heideggerian kiri dapat merujuk pada konsep “*Destruction*”. Melalui istilah tersebut, Heidegger hendak melucuti kesalahpahaman seluruh filsafat Barat dalam memahami tema “Ada”. Meski demikian, Heidegger tidak serta-merta membuang tradisi panjang filsafat Barat yang sudah salah kaprah. Sebaliknya, seluruh kekeliruan tersebut diapresiasi dalam tema “Ada yang menyingkapkan dirinya dalam sejarah”.

Dalam konteks tersebut, “*Destruction*” tidak dapat dimaknai sebagai “penghancuran (*Zerstörung*)”, tetapi lebih pas dimengerti sebagai “dekonstruksi” atau “penataan ulang”. Pada tahap pertama, memang terdapat aspek destruktif untuk mempreteli suatu tradisi pemikiran tertentu. Namun, janganlah dilupakan bahwa aspek konstruktif memainkan peran penting pada tahap selanjutnya, yakni menginkorporasikan ke dalam tataran yang bersifat lebih mendasar dan historis.⁴ Dengan demikian, pembedaan antara “politik” dan “yang-politis” dapat dibaca sebagai dekonstruksi.

Di sisi lain, pokok penting perihal elaborasi pemikiran Heidegger oleh pemikir pascamodern adalah untuk melampaui saintisme dan strukturalisme yang sedang naik daun pada waktu itu. Secara sederhana, elaborasi pemikiran tersebut sering disebut pula sebagai pemikiran pascafondasionalisme. Sekurang-kurangnya terdapat tiga ciri pokok: 1) interogasi terhadap fondasi (totalitas, universalitas, esensi), 2) tidak menghilangkan, tetapi melemahkan status ontologis, dan 3) kemustahilan adanya suatu dasar yang final dan memprioritaskan keserbamungkinan (*contingency*).

Dengan kata lain, muncul orientasi baru terhadap kemungkinan akan landasan yang bersifat kontingen. Di satu sisi, yang-politis berfungsi sebagai suatu landasan sementara atas terbentuknya masyarakat. Di sisi lain, yang-politis terbentuk juga terbentuk dari momen-momen faktual suatu masyarakat. Implikasinya, suatu masyarakat senantiasa berada dalam suatu pencarian akan landasan final. Namun, pada praktiknya, secara maksimal hanya akan tercapai suatu landasan sementara yang bersifat kontingen (serba mungkin).

Berdasarkan pengertian tersebut, hubungan yang-politik dan politik sesungguhnya saling bertentangan, tetapi sekaligus juga tidak terpisahkan. Secara karikatural, yang-politis dapat dipahami sebagai suatu tatanan kehidupan bersama yang bersifat cair, kontingen, dan praksis. Di sisi lain, politik

³ “The notion of the Heideggerian Left (*la gauche heideggérienne*) is taken from Dominique Janicaud and his monumental study on the reception of Heidegger’s thought in France (2001: 291-300). The expression ‘left Heideggerianism’ has also been used, in more critical sense, by Richard Wolin (2001), to describe Herbert Marcuse’s position vis-à-vis his teacher Heidegger.” Oliver Marchart, *Post-Foundational Political Thought: Political Difference in Nancy, Lefort, Badiou and Laclau* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007), 10.

⁴ Bandingkan pula ulasan menarik mengenai konsep “*Destruction*” sebagai “dekonstruksi” pada: Daniel O. Dahlstrom, *The Heidegger Dictionary* (London and New York: Bloomsbury, 2013), 57-58; Michael Inwood, *A Heidegger Dictionary* (Oxford and Malden: Blackwell Publisher, 1999), 183-84; dan Robert Denoon Cumming, *Phenomenology and Deconstruction. Volume One: The Dream is Over* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1991), 135, 138; *Phenomenology and Deconstruction. Volume Three: Breakdown in Communication* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 2001), 87-90.

merujuk pada sistem/struktur kekuasaan suatu masyarakat yang bersifat permanen, rasional, dan teoretis. Dalam konteks itulah Paul Ricœur menganalisis bahwa komunisme adalah suatu upaya untuk menundukkan yang-politis (kebahagiaan dan keadilan) ke dalam kontrol politik (suatu kebijakan mengenai redistribusi ekonomi).⁵

Chantal Mouffe juga menggarisbawahi bahwa yang-politis merupakan unsur antagonistik yang hadir dalam hubungan antarmanusia. Perbedaan antara yang-politis dan politik dipaparkan oleh Mouffe dalam sebuah wawancara sebagai berikut:

Berdasarkan pendekatan saya, 'yang-politis' merujuk pada suatu dimensi antagonistik yang hadir dalam masyarakat manusia. Ia mewujudkan dirinya dalam berbagai konflik dan [atasnya] ia tidak memiliki suatu solusi rasional. [...] Saya juga telah mengajukan untuk membedakan antara 'yang-politis' dan 'politik' untuk menggarisbawahi perbedaan antara level ontologis dan level ontis. Berdasarkan pendekatan saya, yang-politis tidak berada pada level praktik-praktik konkret. Ia merupakan suatu penegasan ontologis mengenai keberadaan negativitas radikal. Di sisi lain, politik berada pada level ontis dan ia terdiri dari berbagai macam praktik sehingga [melaluinya] sebuah tatanan tertentu dapat dibangun demi menata kehidupan bersama berdasarkan prinsip-prinsip etis-politis yang beraneka ragam. [...] Salah satu tesis kunci saya adalah, bahwa tantangan bagi politik demokratis adalah menyediakan institusi-institusi yang memungkinkan berbagai konflik menggunakan suatu bentuk agonistik. Jika tidak, konflik-konflik tersebut sangat mungkin muncul sebagai antagonisme yang dapat menghancurkan suatu asosiasi politis.⁶

Kesimpulannya, Mouffe menunjukkan bahwa yang-politis merupakan unsur “dasar” yang bersifat antagonistik yang sekaligus pula menentukan politik dalam ranah ontis. Mouffe juga berpendapat bahwa di dalam sistem politik demokratis yang sehat, perlu tersedia institusi-institusi yang mengakomodasi terjadinya berbagai konflik secara sehat.

3. Kritik Laclau-Mouffe terhadap Materialisme Historis Marx

Lantas, apa kritik Laclau-Mouffe terhadap materialisme historis Marx? Sekurang-kurangnya terdapat empat status problematis dalam filsafat sejarah Marx, yakni: 1) perihal keniscayaan sejarah, 2) perihal subyek kelas, 3) perihal teleologi dialektis, dan 4) perihal superioritas ekonomi.

Pertama, perihal keniscayaan sejarah. Gagasan Marx ini menjadi sumber krisis sejak Internasional Kedua sehingga membutuhkan gagasan pendukung untuk mengukuhkannya, yaitu hegemoni. Duduk perkaranya: prediksi Marx mengenai keruntuhan kapitalisme karena kontradiksi-kontradiksi internalnya ternyata tidak terbukti. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah teori yang dapat menjelaskan “ketidaksinambungan” analisis Marx dengan praktik politik faktual.

Beberapa pemikir Marxian menyimpulkan bahwa kesatuan di antara kelas pekerja tidak terjadi ketika dihadapkan oleh perkembangan kapitalisme yang eksploitatif. Hal tersebut terjadi karena terdapat pemahaman yang tidak utuh (atau bahkan kesadaran palsu) di antara para buruh. Karena itu, dibutuhkan figur otoriter—seperti partai komunis—untuk memandu dan menjamin keutuhan pemahaman kelas proletariat. Itulah fungsi teori hegemoni Marx: suatu upaya untuk mengelaborasi kontingensi (f)aktual sebagai sekadar bagian dari keniscayaan historis.

Pada gilirannya, konsep “hegemoni” dikembangkan secara lebih radikal dan kritis oleh Antonio Gramsci (1891-1937). Gramsci menolak bahwa ideologi (suprastruktur) dapat ditundukkan ke dalam ekonomi. Sebaliknya, Gramsci menggarisbawahi peran penting ideologi sebagai unsur kunci dalam pertentangan kelas dan politik.

Secara sederhana, hegemoni Gramscian dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mengartikulasikan suatu wacana sehingga menjadi formasi ideologis bagi kebanyakan orang. Dengan kata lain, sebuah kelas bersifat hegemonik apabila ia dapat mengartikulasikan suatu formasi ideologis tertentu menjadi kepentingan nasional dan sekaligus diyakini oleh berbagai kelas lainnya. Prinsip

⁵ Marchart, *Post-Foundational Political Thought*, 36.

⁶ James Martin (ed), *Chantal Mouffe: Hegemony, Radical Democracy and the Political* (London and New York: Routledge, 2013), 231-32.

hegemoni Gramscian inilah yang akan dielaborasi oleh Mouffe dalam konsep “yang-politis”-nya yang selalu berada dalam ketegangan. Dengan demikian, Laclau-Mouffe mengkritik hegemoni Marxian klasik yang bersifat otoriter demi melanggengkan totalitas sejarah.

Kedua, perihal subyek kelas. Sebagaimana para pemikir pascastruktural yang senantiasa curiga terhadap konsep “subyek” modern, demikian pula Laclau-Mouffe mencurigai subyek kelas Marxian. Bagi Laclau-Mouffe, subyek kelas versi Marx bersifat tetap, rasional, dan hanya terpusat antara kelas proletar dan kelas pemilik modal. Padahal, subyek bagi Laclau-Mouffe—dengan dipengaruhi oleh psikonalisis Jacques Lacan—adalah “subyek yang selalu kurang”. Melalui pemahaman subyek yang senantiasa berubah, Laclau-Mouffe dapat menjelaskan dengan mudah munculnya berbagai gerakan sosial yang baru.

Selain itu, analisis Laclau-Mouffe juga menunjukkan bahwa teori hegemoni Marx klasik sesungguhnya merupakan sebuah tanggapan politis ketimbang suatu jawaban atas “ketidaksinambungan” teori Marx. Hegemoni pada dasarnya adalah hasil fragmentasi sosial yang diafirmasi melalui bentuk-bentuk tindakan politik yang muncul pada Internasional Kedua. Namun, di balik fragmentasi tersebut, Laclau-Mouffe sesungguhnya menengarai suatu persoalan filosofis: ketegangan abadi antara keniscayaan dan daya kepelakuan manusia.⁷

Oleh karena itu, Mouffe menganalisis lebih lanjut bahwa pada dasarnya masyarakat sudah tidak dapat lagi didefinisikan secara memadai sebagai suatu substansi yang memiliki identitas organik.⁸ Masyarakat adalah suatu struktur yang tidak dapat diterangkan secara jelas sehingga mustahil untuk dideskripsikan dalam sebuah sudut pandang tunggal atau universal.

Implikasinya, di dalam praktik demokrasi hari ini, adalah hal yang tak terhindarkan untuk mengembangkan sebuah teori tentang subyek yang tidak lagi menjadi pusat, yang heteronom, yang dikonstruksikan dari kemajemukan posisinya. Dengan kata lain, tidak ada identitas subyek yang definit. Pasalnya, subyek sudah selalu berada dalam ambiguitas sebagaimana ia diartikulasikan dalam posisi atau sudut pandang tertentu.

Ketiga, perihal teleologi dialektis. Berkaitan dengan persoalan ambiguitas subyek, secara tradisional para teoretisi Marxis berupaya menjinakkannya dengan konsep dialektika. Melalui dialektika, dimungkinkanlah berbagai situasi baru sebagai tahapan untuk mencapai sosialisme dan kepemimpinan oleh kaum proletar. Dalam konteks teleologis inilah segala macam ambiguitas diletakkan dan dipahami hanya sebagai hal yang bersifat sementara—karena kita mengetahui apa yang sebetulnya ingin kita capai.

Dengan demikian, kontingensi (keserbamungkinan) selalu dikontrol. Prinsip totalitas masih sangat dominan. Dalam pemahaman yang demikian, Laclau dan Mouffe memandang bahwa dialektika tidak lain adalah sebuah prinsip untuk menolak keragaman. Mengapa? Karena dialektika memposisikan segala dinamika sosial sebagai bagian dari satu kerangka besar teleologis.

Di sisi yang berseberangan, para pemikir pascastruktural masih mengadopsi prinsip dialektika dengan penekanan yang berbeda: komitmen pada kemajemukan sosial. Prinsip tersebut dinyatakan untuk menanggapi pandangan bahwa suatu tatanan sosial berfungsi untuk meredam perbedaan. Dalam situasi tersebut, para pemikir pascastruktural justru menggunakan kemajemukan (pluralisme) sebagai “dasar” dalam suatu tatanan sosial demokratis.

Perbedaan, kemajemukan, atau kontingensi bukan lagi dipandang sebagai suatu masalah. Sebaliknya, hal-hal tersebut merupakan visi sosial yang menentukan, yang perlu dijelaskan, dan yang perlu dirangkul dengan antusias—entah melalui hegemoni ataupun dialektika.

Keempat, perihal superioritas ekonomi. Persoalannya, ekonomisme dalam pandangan Marx menentukan segala bentuk hubungan sosial dalam setiap kemungkinan bentuk masyarakatnya. Bagi Laclau dan Mouffe, superioritas ekonomi justru hanya berujung pada kontradiksi-kontradiksi karena

⁷ Sim, *Post-Marxism*, 15.

⁸ Martin, *Chantal Mouffe*, 93.

terlalu berambisi untuk “menjinakkan” atau menundukkan unsur kontingensi dalam sebuah keketatan prinsip ekonomis.

Menurut Laclau-Mouffe suatu sistem tidak pernah utuh. Karena itu, sangat penting untuk membicarakan unsur-unsur kontingen di dalamnya. Berdasarkan kondisi yang tidak utuh tersebut Laclau-Mouffe menyimpulkan bahwa “tidak ada identitas yang dapat dikonstitusi secara utuh” dan “masyarakat bukanlah sebuah obyek wacana yang tetap”.⁹ Alih-alih memprioritaskan pada ekonomi, Laclau-Mouffe “menitikberatkan” pada prinsip kontingensi untuk mendeskripsikan identitas yang tidak dapat ditentukan secara utuh.

Dengan demikian, kritik utama Laclau-Mouffe terhadap Marxisme klasik terletak pada penyederhanaan berbagai kerumitan proses sosial dan yang-politis. Pada gilirannya penyederhanaan tersebut justru melahirkan totalitarianisme dan sistem demokrasi borjuis. Dalam sistem yang demikian, muncul penindasan terhadap individu-individu dengan cara memaksakan suatu model kebudayaan tertentu. Persis pada titik itulah individu-individu terserap ke dalam suatu totalitas dan memandang perbedaan sebagai ancaman.

Sebaliknya, Laclau-Mouffe berpendapat bahwa perbedaan adalah suatu langkah maju di tengah-tengah peradaban pascamodern yang senantiasa menyangsikan otoritas mutlak. Laclau-Mouffe mengadopsi kosakata linguistik untuk mendeskripsikan gagasan tersebut dalam *Hegemony and Socialist Strategy*, yakni sebagai “logika perbedaan” yang menantang “logika persamaan”:

Karena itu, kami melihat bahwa logika persamaan merupakan suatu logika penyederhanaan mengenai ruang politis, sementara logika perbedaan merupakan suatu logika yang meluaskan dan meningkatkan kompleksitasnya. Dengan mengambil contoh dari linguistik, kita dapat mengatakan bahwa logika perbedaan cenderung untuk mengembangkan kutub sintaksis bahasa, jumlah posisi yang dapat masuk ke dalam suatu hubungan kombinasi, dan dengan demikian kesinambungan antara yang satu dengan yang lainnya; sementara itu, logika persamaan mengembangkan kutub paradigmatis—yakni, unsur-unsur yang dapat digunakan untuk mengganti yang satu dengan yang lainnya—sehingga mengurangi jumlah posisi yang mungkin untuk dikombinasikan.¹⁰

4. Politik Agonistik dan Demokrasi Radikal

Telah disebutkan bahwa kritik utama Laclau-Mouffe terhadap Marxisme klasik adalah perihal penyederhanaan proses sosial dan proses politik yang sesungguhnya sangat rumit. Maka, dapat ditengarai pula bahwa Laclau-Mouffe pada dasarnya menolak bentuk predeterminisme Marxisme: komunisme. Bagi Laclau-Mouffe, segala sesuatu yang berada di dunia masih berlangsung—belum selesai dan belum utuh. Mereka juga menyatakan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi dapat mengubah dan membawa siapa saja entah ke politik sayap kanan maupun sayap kiri.

Oleh karena itu, ketegangan-ketegangan (perjuangan, konflik) yang terjadi tidak dapat diterima begitu saja sebagai suatu keniscayaan. Namun, menurut Laclau-Mouffe, kita perlu memeriksa dan menganalisis potensi pembebasan seperti apa yang dapat diharapkan dari ketegangan tersebut. Misalnya, di dalam proyek feminisme. Gerakan feminisme sendiri sangat beragam, tetapi tidak semuanya cocok dengan proyek demokrasi.¹¹ Meski demikian, perhatian utama gerakan feminisme terletak pada proses politik yang belum terwujud sehingga dibutuhkan analisis yang berkelanjutan untuk memperlihatkan status progresif perjuangan mereka.

Dari contoh tersebut, Laclau-Mouffe hendak menggarisbawahi keterbukaan dan keserbamungkinan suatu proses politik sebagai harapan yang layak diperjuangkan bersama. Sebagaimana tidak ada hal yang dapat menentukan hasil suatu perjuangan demokrasi radikal secara mutlak, begitu pula tidak seorang pun dapat menjamin status tatanan politik-sosial tertentu untuk selama-lamanya.

⁹ Bdk. Sim, *Post-Marxism*, 20.

¹⁰ Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy* (London and New York: Verso, 2001), 130.

¹¹ Bdk. Sim, *Post-Marxism*, 27-28.

Jika demikian, apakah tawaran Laclau-Mouffe tidak lain adalah suatu ketegangan, pertentangan, perjuangan, atau konflik yang berlangsung secara terus-menerus di dalam masyarakat? Laclau-Mouffe sadar akan persoalan tersebut. Oleh karena itu, mereka berupaya mengubah paradigma tentang makna gerakan perjuangan Kiri. Dalam *Hegemony and Socialist Strategy*, Laclau-Mouffe menulis, “*Karena itu, tugas kalangan-Kiri tidaklah mungkin untuk meninggalkan ideologi demokratis-liberal, tetapi justru sebaliknya, untuk memperdalam dan mengembangkannya menuju suatu demokrasi yang radikal dan majemuk.*”¹²

Melalui pernyataan tersebut, Laclau-Mouffe hendak menegaskan bahwa perjuangan pascamarxisme justru tidaklah meniadakan ideologi demokratis-liberal. Sebaliknya, tugas kalangan pascamarxisme adalah meradikalkan ideologi tersebut di dalam konteks demokrasi yang majemuk dan radikal. Dalam pemikiran Laclau-Mouffe, pada dasarnya tidak ada satu posisi identitas politik yang telah pasti. Bahkan, di balik politik-politik “progresif” pun terletak seperangkat asumsi-asumsi yang tidak pasti/tetap dan terbuka untuk dikritik oleh lawan politiknya.

Karena itu, prinsip antagonisme dalam pemikiran Laclau-Mouffe merupakan istilah penting untuk menyiapkan kondisi-kondisi terwujudnya suatu demokrasi yang radikal dan majemuk. Dalam konteks ini, “radikal” berarti “tidak dapat direduksi menjadi suatu prinsip fondasional yang utuh”—seperti kesadaran kelas proletar dalam perjuangan kelas ala Marxisme klasik. Dan “demokrasi” merujuk pada “suatu keadaan bergerak yang sedang terjadi sebagai perkembangan suatu imajinasi tentang kesetaraan”. Dalam konteks inilah perjuangan kelas proletar dapat dipahami sebagai suatu tawaran yang menawarkan berbagai peluang menarik akan terbentuknya persekutuan baru yang menantang situasi politik status quo.

Kendati demikian, politik demokrasi radikal mensyaratkan satu kondisi yang harus dipenuhi, yakni kehendak baik di antara berbagai gerakan atau perjuangan yang sangat berbeda-beda. Laclau-Mouffe menamakan prinsip ini sebagai “prinsip kesetaraan demokratis”. Tanpa prinsip tersebut, demokrasi tidak lain akan menjadi otoritarianisme atau totalitarianisme. Selain itu, prinsip kesetaraan demokratis menumbuhkan suatu “akal sehat” baru yang mengubah cara pandang akan identitas kelompok yang berbeda satu sama lainnya.¹³

Implikasinya, tuntutan suatu kelompok diartikulasikan secara sepadan dengan kelompok lainnya. Maksudnya, terdapat suatu pengakuan bahwa kepentingan suatu kelompok tidak dapat dicapai dengan mengorbankan kepentingan kelompok lainnya. Karena itu, demokrasi perlu bersifat majemuk sehingga dapat menjamin prinsip kesetaraan tersebut.

Secara sederhana, dapat dinyatakan pula bahwa proyek Laclau-Mouffe dalam mengembangkan konsepsi yang-politik berpusat pada antagonisme—sebagai salah satu prinsip utamanya (Martin 2013, 228). Mouffe berpendapat demokrasi radikal hanya dimungkinkan apabila kita mengakui antagonisme sebagai unsur yang tak mungkin dihilangkan. Sebagai konsekuensinya, adalah hal yang mustahil untuk mencapai suatu konsensus rasional yang inklusif di dalam politik.

Dalam konteks itulah Mouffe menantang gagasan mengenai prosedur-prosedur deliberatif untuk mencapai konsensus politik. Menurut Mouffe, politik demokratis sudah selalu mensyaratkan kehadiran suatu “ranah publik yang agonistik” sebagai wadah konfrontasi berbagai proyek hegemonik yang saling bertentangan.¹⁴ Ketika situasi tersebut telah diakui, maka tugas politik demokratis adalah menyediakan institusi-institusi sehingga berbagai konflik tersebut disublimasi dalam bentuk agonistik. Maksudnya, setiap pihak tidak lagi menganggap penentangannya sebagai musuh yang harus dimusnahkan tetapi sebagai lawan.

Jadi, agonisme adalah suatu bentuk antagonisme yang telah “dijinakkan” atau “disublimasi”. Meski demikian, antagonisme akan tetap selalu ada dan selalu dapat muncul kapan saja.

¹² Laclau and Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy*, 176.

¹³ Sim, *Post-Marxism*, 30.

¹⁴ Martin, *Chantal Mouffe*, 231.

Melalui prinsip agonisme itulah Mouffe meradikalkan politik demokratis. Baginya, politik dalam sistem demokrasi seharusnya tidak bertujuan untuk mencapai konsensus rasional melalui prinsip deliberasi yang menjamin ketidakberpihakan (imparsialitas). Sebaliknya, menurut Mouffe, politik sudah selalu berpihak. Dan apa yang dipertaruhkan dalam demokrasi adalah kodrat yang kita sebut sebagai “mereka” (pihak di luar kita) dan bagaimana kita merekonstruksinya.

Dengan mengelaborasi konsepsi hegemoni Gramscian, Mouffe menunjukkan bahwa istilah “akal sehat” pun sudah selalu bersifat hegemonik. Pasalnya, nilai-nilai yang ada di dalam suatu “akal sehat” telah tertanam begitu dalam sehingga asal-usul politisnya telah terlupakan. Akibatnya, suatu konsepsi tentang dunia dan/atau gagasan-gagasan tertentu dinyatakan sebagai hal yang “alamiah”.

Penutup

Secara umum pendekatan pascamarxisme menunjukkan bahwa teori materialisme historis Marx bersifat teleologis, otoriter, dan bahkan kurang radikal. Sekurang-kurangnya Laclau-Mouffe telah menunjukkan bahwa gagasan Marx mengenai komunisme, kelas proletar sebagai agen emansipatorisnya, dan supremasi ekonomi tidak lagi memadai untuk menerangkan praksis politik aktual.

Dengan mengelaborasi pemikiran Heidegger, kalangan pascamarxisme membedakan “yang-politis” dan “politik”—seraya memberi penekanan terhadap yang-politis. Dalam konteks tersebut, yang-politis merupakan status ontologis yang berfungsi sebagai “landasan” yang selalu bersifat kontingen.

Selanjutnya, status ontologis tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh Laclau-Mouffe untuk meradikalkan gagasan-gagasan Marxisme klasik, di antaranya gagasan tentang demokrasi. Melalui prinsip agonisme, Mouffe memperlihatkan bahwa hakikat demokrasi adalah pertentangan, konflik, perbedaan antara satu pihak dan pihak lainnya. Persis pada pokok itulah demokrasi bertugas untuk mengakomodasi berbagai pertentangan tersebut melalui institusi-institusi politiknya. Dan tujuan demokrasi radikal sekurang-kurangnya adalah proses emansipasi dan pluralisme itu sendiri—yang sejatinya tidak akan pernah tercapai secara utuh.

Melalui gambaran ringkas inilah penulis menjawab pertanyaan di awal paragraf: apa kaitan inheren antara pascamarxisme dan dekonstruksi? Sejauh varian pascamarxisme dipahami dalam lensa Heideggerian-Kiri, maka penamaan “yang-politis” merupakan dekonstruksi terhadap politik. Dalam konteks ini “yang-politis” bersifat kontingen, praksis, dan tidak dapat direduksi ke dalam tatanan politik rasional apa pun.

Daftar Pustaka

- Cumming, Robert Denoon. *Phenomenology and Deconstruction. Volume One: The Dream is Over*. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1991.
- _____. *Phenomenology and Deconstruction. Volume Three: Breakdown in Communication*. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2001.
- Dahlstrom, Daniel O. *The Heidegger Dictionary*. London and New York: Bloomsbury, 2013.
- Inwood, Michael. *A Heidegger Dictionary*. Oxford and Malden: Blackwell Publisher, 1999.
- Laclau, Ernesto, and Chantal Mouffe. *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. London and New York: Verso, 2001.
- Lemon, M. C. *Philosophy of History: A Guide for Students*. London and New York: Routledge, 2003.
- Marchart, Oliver. *Post-Foundational Political Thought: Political Difference in Nancy, Lefort, Badiou and Laclau*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.
- Martin, James (ed). *Chantal Mouffe: Hegemony, Radical Democracy and the Political*. London and New York: Routledge, 2013.
- Sim, Stuart. *Post-Marxism, An Intellectual History*. London and New York: Routledge, 2000.
- Tormey, Simon and Jules Townshend. *Key Thinkers from Critical Theory to Postmarxism*. London: SAGE Publications, 2006.